



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN  
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: I
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Rektor Perguruan Tinggi
Hari/Tanggal	: 15 September 2022
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: <b>Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi dan Tantangan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia</li><li>2. Penguatan Akses, Mutu, dan Daya Saing Perguruan Tinggi (PT)</li><li>3. Penguatan Kebijakan Anggaran dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT)</li><li>4. Masukan dan Rekomendasi Penguatan Perguruan Tinggi (PT)</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 29 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Nazaruddin Malik, SE, M.Si Wakil Rektor 2 bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana dan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</li><li>2. Dr. Ahmad Juanda, Ak, MM.CA Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</li><li>3. Ir. Suyatno, M.Si. Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</li><li>4. Dwi Winarno, M.Si Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)</li></ol>

5. Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
6. Taufik Hidayadi Dekan FEB Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
7. Dr. Muhammad (Affi) M.H Dekan FH Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
8. Andri Noviarini Dekan FITK Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
9. Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, SE. MM. *Vice Rector Academic and Development* Universitas Bina Nusantara
10. Stephen Wahyudi Santoso, BSE, MSIST, CBDMP *Presiden Of Binus Higher Education* Universitas Bina Nusantara
11. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si Rektor Universitas Sumatera Utara
12. Ikhsan Siregar ST, M.Eg Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas Universitas Sumatera Utara
13. Dr. Ir. Apolo Safanto ST. MT Rektor Universitas Cenderawasih
14. Dr. Oscar Wambrauw, SE, M.Sc, Agr Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cenderawasih
15. Prof. Budi Santosa, PhD Rektor Institut Teknologi Kalimantan (TIK)
16. Prof. Nurul Widiastuti, S.Si, M.Si, PhD Wakil Rektor Bidang Akademik
17. Rahmania S.Pd M.Sc Kepala Pusat PJM Institut Teknologi Kalimantan (TIK)
18. Putri Sekar Wilis, SE Koordinator Rumpun Keuangan dan BMN Institut Teknologi Kalimantan (TIK)
19. Ashadi Sasongko S.Si, M.Si Kepala Pusat Pengembangan SDM Institut Teknologi Kalimantan (TIK)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh **Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Universitas Bina Nusantara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Cenderawasih, dan Institut Teknologi Kalimantan, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

### 1. Universitas Sumatera Utara

- a. Tantangan pengelolaan perguruan tinggi harus adaptif dalam tata kelola, merespon perubahan di dunia industry era disrupsi dan hiperkompetisi dan penguatan pendanaan.
- b. Perlunya penguatan daya saing perguruan tinggi dengan memenuhi standar internasional dan penguatan kebijakan anggaran.
- c. Memberikan mandatory bagi perguruan tinggi untuk mengikutsertakan ke industry secara proporsional dan memfasilitasi *sharing resource* infrastruktur digital agar akses pendidikan merata.

### 2. Universitas Cenderawasih

- a. Pengelolaan Tri Dharma perguruan tinggi di era normal dengan penjaminan mutu harus akuntabel.
- b. Kondisi perguruan tinggi sedang penyesuaian administrasi institusi akibat migrasi data dari bentuk BLU ke PTNBH, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meningkatkan akreditasi dan meningkatkan kerjasama dan daya serap lulusan.
- c. Status perguruan tinggi Satker menghambat otonomi bidang akademik dan non akademik.
- d. Mendorong regulasi kerjasama dalam riset perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

### 3. Institut Teknologi Kalimantan

- a. Tantangan pengelolaan perguruan tinggi perlu penyamarataan regulasi dan program terhadap PTN satker, PTN Baru, PTN BLU dan PTN BH.
- b. SDM di perguruan tinggi terbatas, perlu pencabutan moratorium pengadaan SDM terutama bagi PTN Baru.
- c. Sarana dan Prasarana perguruan tinggi terbatas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, dan karya penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Regulasi pengelolaan anggaran PTN Satker sulit untuk melaksanakan kebutuhan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan perlu revisi regulasi anggaran yang tidak sesuai untuk perguruan tinggi agar daya serap tinggi.
- e. Permasalahan perguruan tinggi di PTN Baru sangat memerlukan SDM namun tidak diperbolehkannya merekrut Pegawai Non ASN dikarenakan kebijakan Menpan&RB bahwa Tahun 2023 sudah tidak lagi ada pegawai dengan status Non ASN di Pemerintah (PP 49/2018).
- f. Perlu program hibah untuk PTN Baru (fasilitas peralatan laboratorium dan pendampingan peneliti).

#### **4. Universitas Muhammadiyah Malang**

- a. Sebelum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UMM telah melaksanakan konsep MBKM.
- b. Pemerintah memfasilitasi kerjasama Internasional untuk PTS.
- c. Mendorong peninjauan Kembali kebijakan terkait Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), deregulasi BAN-PT, dan Akreditasi berbasis Masyarakat (*Society Recognition*).
- d. Permasalahan akses terhadap perguruan tinggi telah dibantu oleh PTS, untuk itu perlu penguatan akses, mutu dan daya saing dengan pemberian beasiswa, tidak diskriminasi, kolaborasi internasional, dan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi digital, leadership dan mahir di bidangnya.
- e. Hambatan birokrasi perguruan tinggi menyulitkan pengelolaan PTS, diantaranya terhambat dalam perizinan, akreditasi, standarisasi mutu, SDM PTS dan keterbatasan anggaran PTS.
- f. Regulasi pendukung dalam pengelolaan perguruan tinggi diantaranya Perpres No. 68 Tahun 2022 (Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi), UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP No. 68 Tahun 2019 Tentang KEK Singhasari, dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Sedangkan regulasi yang menghambat Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2022, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2022 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

#### **5. Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia**

- a. Berubahnya pola hidup manusia, perubahan ekosistem kerja dan ekosistem Pendidikan perguruan tinggi paling tidak memiliki tantangan prioritas sebagai berikut:
  - 1) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi
  - 2) pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industry dan Lembaga mitra
  - 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian
  - 4) pengembangan produsen IPTEK-Inovasi
  - 5) pengembangan dana abadi (*endowment fund*)
  - 6) mendorong focus perguruan tinggi mengembangkan tridharma perguruan tinggi
- b. Kemendikbudristek RI harus menjadikan PTS sebagai sasaran utama program penguatan kapasitas Lembaga, Dosen, dan Mahasiswa.
- c. Alokasi penggunaan anggaran sebesar 20% APBN fungsi pendidikan diperuntukkan untuk mendukung operasional PTS.
- d. Mengusulkan Pemerintah membuat kebijakan skema *Block Grand* biaya operasional yang di berikan kepada PTS dan merevisi kebijakan pembagian kouta KIP Kuliah yang selama ini merugikan PTS.

## 6. Universitas Bina Nusantara (Binus University)

- a. Tantangan perguruan tinggi pasca pandemi COVID 19, perubahan landscape pekerjaan, perubahan perilaku generasi, relevansi lulusan dan hasil karya, produktifitas, efisiensi termasuk peraturan baru Pemerintah seperti MBKM, Rasio Dosen, Sistem Informasi: PD DIKTI, BAN-PT, SIJALI, SISTER, BKD, PINDAI dll.
  - b. Dalam pengelolaan perguruan tinggi diperlukan peta perguruan tinggi Indonesia, peta kebutuhan Dosen, Peningkatan mutu Dosen, Penetapan kouta penerimaan mahasiswa S1 di PTN, kemudahan akses internet, dan penggabungan PT berjalan optimal.
  - c. Perlu dukungan terhadap perguruan tinggi bereputasi, kerjasama perguruan tinggi lokal dan internasional, peningkatan branding Indonesia menjadi negara destinasi pendidikan tinggi bagi mahasiswa asing, mengundang Dosen Profesor dari manca negara mengajar di Indonesia, dan penyediaan data kinerja perguruan tinggi.
  - d. Mengusulkan rencana pengenaan PPN ke mahasiswa ditunda sampai dengan tahun 2025 agar diperpanjang sampai 2030, sedangkan untuk pajak lainnya SPT pajak badan sudah cukup banyak perubahan untuk Yayasan Pendidikan dan sudah sangat membantu, seperti penggunaan sisa surplus bisa digunakan untuk dana abadi.
  - e. Terkait pendanaan untuk perguruan tinggi perlu memberikan dukungan terhadap pendanaan riset yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat dan kebijakan PTN menjadi PTN BH diharapkan memberikan akses pendanaan yang adil bagi PTS.
  - f. Mengusulkan kemudahan perijinan magang ke luar negeri dan Dosen asing mengajar dan riset bersama di Indonesia.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Menghimbau para narasumber agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia.
  2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan pengelolaan PTS agar lebih merata baik untuk beasiswa dan biaya akreditasi termasuk perlunya kebijakan khusus terkait pajak untuk pendidikan.
  3. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan Inovasi, kolaborasi dan digitalisasi.
  4. Mendorong perguruan tinggi agar ada sinergitas dan harmonisasi antara alumni dengan mahasiswa untuk penguatan perguruan tinggi.
  5. Mendorong LLDIKTI melakukan pengembangan laboratorium yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan di daerah agar lulusan perguruan tinggi memiliki nilai tambah lulusan dapat terserap di daerahnya.
  6. Mendorong penambahan Postur Anggaran fungsi Pendidikan untuk Kemendikbudristek RI.

7. Mendorong Pemerintah untuk memberikan dukungan ke PTN dan PTS diantaranya pemerataan distribusi KIP Kuliah dan tambahan dukungan anggaran untuk akreditasi.
  8. Mendorong perlunya afirmasi untuk PTN Baru khususnya Institut Teknologi Kalimantan sebagai PTN untuk Ibu Kota Baru Indonesia.
  9. Mendorong Pemerintah untuk membuka formasi untuk penguatan SDM di Perguruan Tinggi.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.46 WIB.

**KETUA RAPAT,**

  
**Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin**